

MENGATASI KRISIS KARAKTER BANGSA: Suatu Tinjauan Alternatif Kebijakan Pemerintah

Hartri Sirait

Analisis Kebijakan Ahli Madya, BPIP

ABSTRAK

Upaya Pembangunan karakter bangsa merupakan suatu hal urgen saat ini, dimana tantangan kebangsaan menghadapi dilema serius terutama dalam menghadapi permasalahan berbangsa dan bernegara yang antara lain: Pembudayaan Pancasila di masyarakat mengalami degradasi ditandai dengan maraknya krisis integritas, moralitas dan etika dalam berbangsa dan bernegara. Terjadinya krisis integritas, ditandai praktik korupsi semakin meningkat (Transparency International Indonesia-2022) dan maraknya gerakan radikalisme, terorisme, intoleransi, hoaks, politik SARA yang menyebabkan terjadinya polarisasi sosial yang tersebar dimasyarakat dengan masuknya ideologi transnasional yang dapat menyebabkan hadirnya upaya-upaya deideologisasi Pancasila. Melihat indikasi tersebut, sudah saatnya pemerintah bersama masyarakat untuk mengantisipasi agar krisis karakter bangsa tidak memudar, dan melalui pembinaan ideologi Pancasila sudah saatnya didukung dan diimplementasikan secara terstruktur, tersistem dan massif.

Kata Kunci : Karakter Bangsa, Pancasila

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibentuk untuk membantu Presiden dalam hal: Merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP); Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP; Penyusunan standardisasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP; Menyusun rekomendasi terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Presiden dalam hal pembentukan tersebut berharap BPIP dapat menjadi motor penggerak untuk membumikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh pihak yang berkepentingan, Memang tidak mudah untuk menggerakkan seluruh komponen elemen bangsa tanpa ada pemahaman yang sama dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara.

Dengan kata lain, segenap elemen pemangku kepentingan mulai dari penyelenggara negara, dunia pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dan pelaku media, secara kolaboratif harus memiliki visi dan tujuan sama untuk mengimplementasikan **strategi aksi nyata** pengamalan dan pembudayaan Pancasila. Terutama bagi para penyelenggara negara dan

masyarakat untuk dikuatkan pemahaman Pancasila dalam rangka **upaya pembangunan karakter bangsa**. Hal tersebut bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran kritis dalam merespon segala isu strategis dan tantangan kebangsaan yang terjadi saat ini, antara lain:

- 1) Pembudayaan Pancasila di masyarakat mengalami degradasi ditandai dengan maraknya krisis moralitas ataupun mentalitas bangsa.
Adanya krisis integritas yang ditandai praktik korupsi pada peringkat 110 dunia dari 180 negara pada tahun 2022 (Transparency International Indonesia);
- 2) Masuknya ideologi transnasional yang dapat menyebabkan hadirnya upaya-upaya deideologisasi Pancasila. Terkait ini, data menyebutkan bahwa sebanyak 33% guru terkontaminasi paham mendirikan negara Islam, serta terdapat 3% anggota TNI terpapar paham radikalisme. Nilai-nilai baru yang dibawa itu justru cenderung melemahkan ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa, yang berdampak pada krisis integritas, lemahnya etos kerja, serta terganggunya integrasi bangsa yang ditandai dengan maraknya gerakan radikalisme, terorisme, intoleransi, hoaks, politik SARA yang menyebabkan polarisasi sosial.
- 3) Pembudayaan Pancasila di era sosial media: Semakin buruk tingkat keadaban/kesopanan masyarakat dalam menggunakan media social/digital masyarakat Indonesia.

Dari survei pihak ketiga dan informasi yang berkembang baik media elektronik, dan media social seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah ini, memberikan suatu gambaran dan fakta yang mengkhawatirkan terhadap keutuhan bangsa.

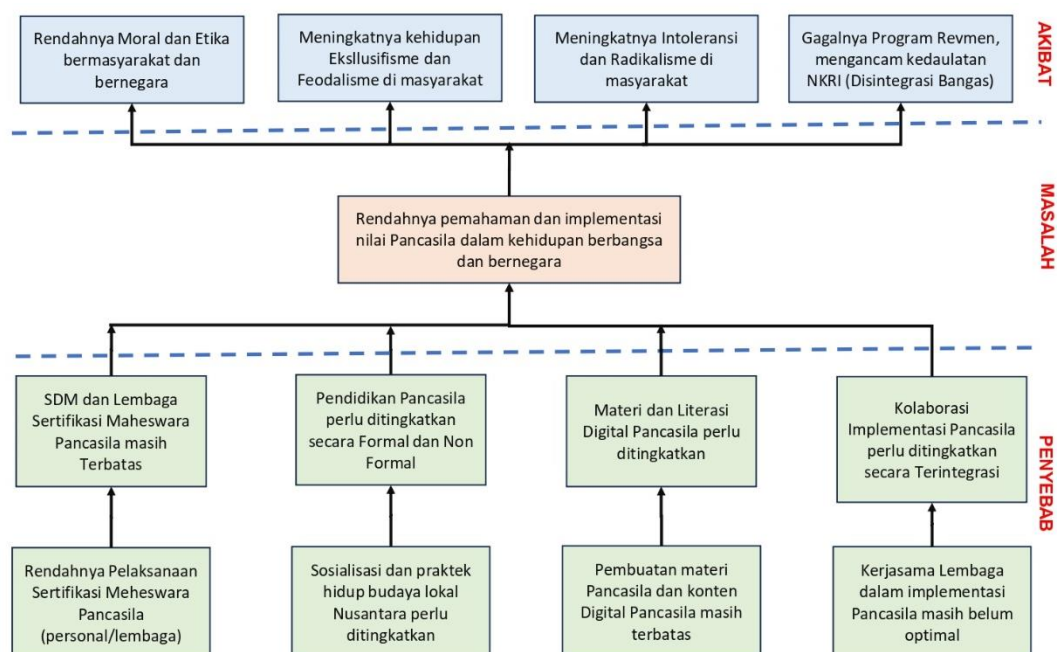
NO	FAKTA SURVEI DAN ISU TERKAIT	INDIKATOR	SUMBER REFERENSI
1	Pancasila bukan ideologi permanen, tetapi dapat diganti dengan ideologi lain	83,30%	Survei Setara Institute, 17 Mei 2023
2	Setuju syariat Islam sebagai landasan bernegara (SMA)	56,30%	Survei Setara Institute, 17 Mei 2023
3	Derajat intoleransi dan radikalisme pada siswa/siswi (pasif/aktiv/terpapar)	29,80%	Survei Setara Institute, 17 Mei 2023
4	Guru terpapar setuju mendirikan negara berasaskan agama	33,00%	Data Kemenko PMK RI, Oktober 2023
5	Prajurit TNI terpapar radikalisme	3,00%	Data Kemenko PMK RI, Oktober 2023
6	Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2022	IPK=34	Transparansi Internasional Indonesia, 110/180
7	Pelanggaran Kode Etik dan Moral Serius Ketua MK 2023	Vonis	MKMK No.027/MKMK/L/11/2023, Diberhentikan

Gambar 1: Identifikasi Data Survei 2022 – 2023

IDENTIFIKASI MASALAH

Melihat kondisi integritas bangsa yang semakin menurun dan mengkhawatirkan dimana 33% guru setuju untuk mendirikan negara berasaskan Agama (Kemenko, 2023), dan hal ini berkorelasi juga kepada pemuda/pelajar yang diajar yang meyakini bahwa Pancasila dapat diganti dengan Ideologi lain (83,3%-Setara Institute).

Hal tersebut menandakan bahwa rendahnya pemahaman dan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disebabkan ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2: Identifikasi Melalui Analisis Pohon Masalah

Rendahnya moral dan etika bermasyarakat, bernegara serta meningkatnya kehidupan eksklusifisme dan feodalisme, dan meningkatnya intoleransi dan radikalisme merupakan suatu akibat dari rendahnya pemahaman dan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dimana masih terbatasnya penyediaan SDM dan Lembaga sertifikasi Maheswara Pancasila secara terstruktur, systematis, dan massif melalui suatu Pendidikan (pendidikan karakter) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila baik formal/non formal. Sementara penyediaan materi dan literasi digital Pancasila yang menjadi acuan Pendidikan di masyarakat masih terbatas dan minim nilai.

Dilain sisi perlu juga dilakukan pembuatan materi dan literasi digital untuk dapat disosialisasikan secara massif menggunakan berbagai media (buku, jurnal, medsos, tiktok, Youtube, dsb) untuk meningkatkan partisipatif masyarakat, organisasi profesi dan lembaga pemerintah terkait.

Oleh karenanya, Pemerintah melalui program Revolusi Mental punya tujuan agar Indonesia menjadi negara-bangsa yang maju, modern, mandiri, dan berkarakter. Arah kebijakan di atas perlu menjadi acuan bersama oleh kementerian/lembaga terkait sebagai leading sektor maupun mitra-mitra strategis di pemerintahan/organisasi kemasyarakatan baik pusat maupun daerah untuk turut serta berkolaborasi mengawal dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan Revolusi Mental dalam setiap program/kegiatan Pembinaan Ideologi

Pancasila, Pendidikan Kewargaan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dari masing-masing lembaga/instansi maupun organisasi kemasyarakatan.

Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama integrasi bangsa perlu diaktualisasikan dan diperkuat kembali melalui wujud konkret **“aksi nyata”** dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Semua pihak perlu memandang penting pembentukan jati diri bangsa melalui PIP, sehingga nilai-nilainya dapat melebur ke dalam pola pikir, pola kerja, dan pola hidup manusia Indonesia yang kemudian dapat terefleksikan dalam karakter dan budaya khas masyarakat.

“Pendidikan Pancasila dalam membentuk jati diri bangsa merupakan konsep kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan identitas suatu bangsa, dimana karakteristik dan nilai-nilai yang membentuk jati diri mereka sebagai sebuah **entitas kolektif** yang mencerminkan suatu sejarah, budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat/bangsa” (FGD PIP, 2023).

ANALISIS PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan terkait rendahnya pemahaman dan implementasi nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di atas, tentu akan berakibat terhadap: Rendahnya Moral dan Etika bermasyarakat dan bernegara; Meningkatnya kehidupan Eksklusifisme dan Feodalisme di masyarakat; Meningkatnya Intoleransi dan Radikalisme dalam kehidupan bermasyarakat; Gagalnya Program Revolusi mental, mengancam kedaulatan NKRI (Disintegrasi Bangsa)

Berdasarkan atas identifikasi dan pemetaan permasalahan tersebut maka analisis solusi terhadap permasalahan tersebut, dapat dijabarkan dalam 5 (lima) alternatif solusi yang meliputi:

Alternatif 1: Peningkatan SDM dan Lembaga Sertifikasi Maheswara Pancasila, dimana BPIP dapat meningkatkan ketersediaan SDM maupun Lembaga sertifikasi untuk memberikan ToT (training of trainer) sebagai Asesor Maheswara Pancasila yang sesuai dengan standar sertifikasi yang telah ditentukan.

Alternatif 2: Pendidikan Pancasila perlu ditingkatkan secara berjenjang dan massif. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan kurikulum Pancasila untuk Pendidikan Formal SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi maupun Pendidikan non Formal diluar Pendidikan formal seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta lembaga sejenis.

Alternatif 3: Materi Pancasila dan Literasi Digital Pancasila perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan pengenalan, pemahaman terhadap Pancasila maka perlu ditingkatkan pembuatan materi Pancasila (buku pelajaran dan buku referensi) baik untuk SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, maupun kalangan masyarakat. Begitu juga pengenalan Pancasila kepada generasi muda yang sering menggunakan sarana gadget, dapat dilakukan melalui literasi digital Pancasila melalui media sosial baik Twitter, Facebook, Tiktok, maupun Instagram, melalui pembuatan konten-konten aplikasi yang interaktif dan positif bernuansa budaya nusantara.

Alternatif 4: Kolaborasi implementasi Pancasila perlu ditingkatkan secara Terintegrasi. Karena Pancasila merupakan spirit hidup berbangsa dan bernegara, maka pada alternatif solusi ini dapat dilakukan program kerjasama yang melibatkan berbagai sektor baik di lingkungan pemerintah, pegiat pendidikan, pegiat media, organisasi kemasyarakatan, dan Badan Usaha. Pelaksanaan kolaborasi ini perlu diinisiasi oleh BPIP sebagai Leading dalam pelaksanaan program Revolusi Mental melalui Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan Pembinaan ini sifatnya dapat dilaksanakan secara terstruktur secara Top-Down maupun Kultural, dengan melibatkan partisipatif masyarakat secara sukarela melalui pelaksanaan kolaboratif PIP.

Kolaboratif di internal BPIP dapat dilakukan seperti pada: Penyusunan Materi Pancasila untuk ASN/TNI/Polri (eksekutif, legislatif, yudikatif) serta masyarakat (organisasi politik, ormas, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat) dapat diimplementasikan melalui Sosialisasi Pancasila baik secara daring maupun luring melalui media sosial; Kemudian melakukan Sertifikasi ToT Maheswara Pancasila baik di pusat maupun di daerah dengan menggunakan standar materi yang telah ditentukan tersebut.

Begitu juga dengan partisipatif Eksternal BPIP dalam hal ini masyarakat. Kenapa masyarakat ikut terlibat ?, karena nilai-nilai Pancasila tersebut sudah ada di dalam kehidupan masyarakat, untuk itu perlu digali, dipupuk, dirawat dan diberdayakan untuk selalu hidup dalam praktek kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat tetapi juga aparatur pemerintah (ASN) baik di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun TNI/Polri perlu kolaborasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan sertifikasi PIP sesuai dengan kondisi kebutuhannya.

Alternatif 5: Advokasi dan pengawasan Regulasi Yang Bertentangan dengan Nilai Pancasila. Pada alternatif solusi ini, BPIP seyogyanya dapat memberikan advokasi hukum kepada masyarakat yang mengalami penindasan ataupun ketidakadilan hak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, seperti contoh hak dalam menjalankan ibadah, hak dalam memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, dsb.

Begitu juga dengan regulasi/aturan, perlu adanya pengawasan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah/kementerian/lembaga baik di pusat maupun di daerah agar aturan yang dibuat dan dikeluarkan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, sehingga tujuan bernegara untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dapat ternaungi dengan baik.

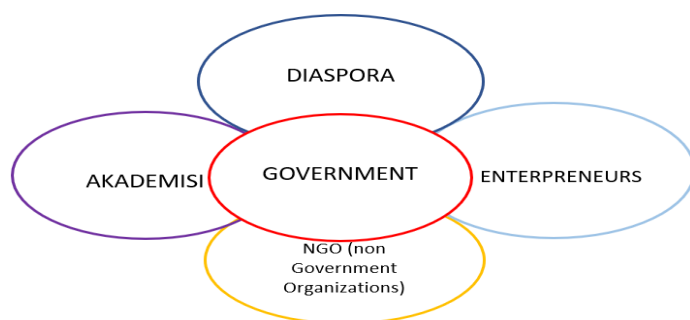
Berdasarkan penilaian terhadap 6 kriteria solusi (William Dunn, 2013) ditentukan fokus solusi pembahasan sebagaimana terlihat pada Gambar 3 di bawah ini.

No.	ALTERNATIF SOLUSI	BOBOT KRITERIA						
		Efektivitas (20)	Efisiensi (15)	Kecukupan (15)	Kesamaan (10)	Responsivitas (20)	Kelayakan (20)	TOTAL (100)
1	Peningkatan SDM dan Lembaga Sertifikasi Maheswara Pancasila	90	80	80	90	100	100	91,0
2	Pendidikan Pancasila perlu ditingkatkan secara terstruktur dan masif	95	90	90	95	95	100	94,5
3	Materi Pancasila dan Literasi Digital Pancasila perlu ditingkatkan	90	90	80	85	90	100	90,0
4	Kolaborasi Implementasi Pancasila perlu ditingkatkan secara Terintegrasi	100	95	92	93	96	100	96,6
5	Advokasi dan Pengawasan Regulasi Yang bertentangan dengan Nilai Pancasila	83	75	80	90	95	100	87,9

Gambar 3: Alternatif Solusi dan Kriteria (William Dunn, 2013)

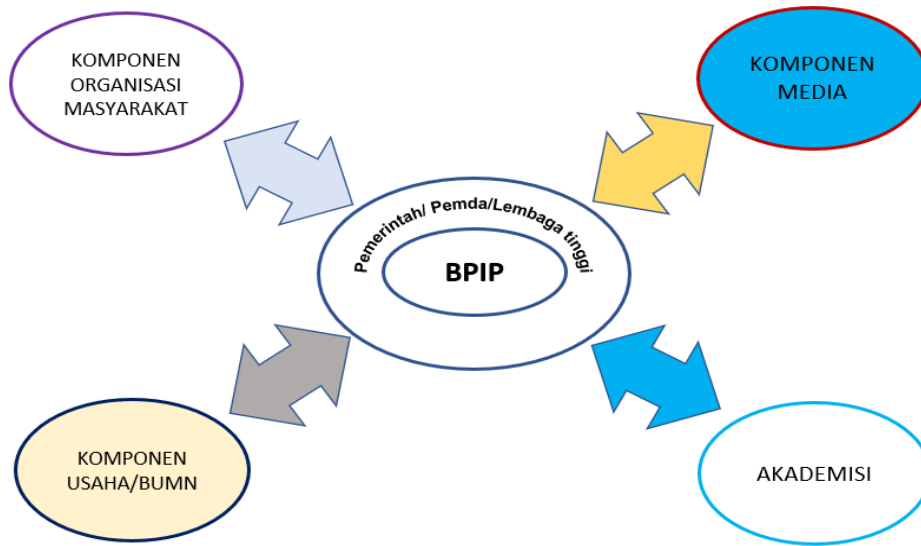
Dari hasil penilaian kriteria terkait mengatasi **Rendahnya pemahaman dan implementasi nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara**, solusi kebijakan yang dianggap lebih efektif dilakukan adalah **Kolaborasi Implementasi Pancasila secara Terintegrasi**.

Untuk menindaklanjuti solusi tersebut, secara konsep kolaborasi terintegrasi model Penta helix (Tonkovic et.al. 2019) dapat menjadi salah satu strategi kolaborasi yang dapat digunakan dalam solusi ini, seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar-2. Model Penta Helix (Tonkovic et.al, 2019)

Lebih lanjut, dalam implementasi terhadap penerapan konsep tersebut, BPPI sebagai Lembaga pemerintah dapat menjadi leading sektor dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dengan mengembangkan konsep tersebut, seperti di bawah ini.



Gambar 5. Sinergi Kolaborasi Model 5 (lima) Jaring Mandala (JPM)

Oleh karena itu, kolaborasi implementasi Pancasila secara terintegrasi, dapat dilihat terhadap 2 (dua) factor yang dapat mendukung keberhasilan tersebut.

Kedua Faktor yang mendukung keberhasilan dalam kolaborasi terintegrasi tersebut meliputi kesiapan kolaborasi internal BPIP, dan dukungan kolaborasi dari keterlibatan eksternal BPIP. Bagaimana kolaborasi terintegrasi tersebut dapat dilaksanakan, berikut dapat dijelaskan:

Secara internal BPIP, perlu **dikolaborasikan** terhadap pelaksanaan:

- 1) Penyusunan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai kebutuhan stakeholder, baik ASN/TNI/POLRI, maupun masyarakat dan pelajar (SD/SMP/SMA dan Perguruan Tinggi).
- 2) Pendidikan Karakter Pancasila dan Sertifikasi ToT Maheswara serta Sertifikasi Lembaga Penyelenggara ToT Pancasila kepada ASN maupun masyarakat/ organisasi kemasyarakatan
- 3) Kerjasama pembudayaan Pancasila, serta melaksanakan Sosialisasi terhadap Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), baik melalui seminar, diskusi, sarasehan, jurnal, buku referensi, maupun melalui media elektronik, TV, dan media sosial.
- 4) Pelaksanaan Advokasi Hukum dan Pengawasan Regulasi
- 5) Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Kolaborasi dengan eksternal BPIP dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan:

- 1) Pembinaan Ideologi Pancasila baik di lingkungan kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maupun dengan melibatkan organisasi politik, organisasi masyarakat dsb.
- 2) Sosialisasi PIP secara daring maupun luring dengan seluruh stakeholders terkait sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
- 3) Pendidikan Karakter Pancasila dengan melibatkan Pemerintah pusat/ daerah, masyarakat maupun tokoh masyarakat terkait.
- 4) Pembentukan badan pelaksana Sertifikasi ToT Pembinaan Ideologi Pancasila baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan stakeholders terkait.
- 5) Monitoring dan evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila secara berjenjang dan berkelanjutan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Kolaborasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai berikut:

- 1) Dibuat Payung Hukum setingkat Peraturan Pemerintah/Presiden untuk dapat dilaksanakan kegiatan PIP bersama dengan stakeholder pemerintah terkait, yang dapat dimasukkan dalam program Revolusi Mental pada RPJM 2025 s.d. 2030 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 2) Membentuk Jejaring Kolaborasi Pelaksanaan PIP dengan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, maupun organisasi profesi untuk mendukung sosialisasi dan pemahaman Pancasila secara efektif di Tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi (seperti pemerintah daerah, pegiat Pendidikan, pegiat media, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha)
- 3) Membentuk Tim Kolaborasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PIP di Tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Tingkat Kota/Kabupaten, dan Tingkat Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
- 2) Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- 3) LAN RI, April 2017, Modul Pelatihan Khusus Analis Kebijakan, Jakarta: Pusaka
- 4) FGD PIP, 2022, Forum Group Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila, April 2022
- 5) William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013
- 6) Tonkovic et.al, 2019, Tonkovic, A. M., Veckie, E., & Veckie, V. W, Aplications Of Penta Helix Model In, 2019 Economic Development. Croatia
- 7) Setara Institute, Mei 2023, Data Hasil Survey Generasi Muda Indonesia
- 8) Transparansi Internasional Indonesia (TII, 2022), Survey Persepsi Korupsi Indonesia
- 9) Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Oktober 2023, Data Laporan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 10)JPM, H.Sirait.2022, Jejaring Panca Mandala Konsep dan Implementasi Pancasila (Unpublished)